

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DAN KESESUAIANNYA  
DENGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

**Maryanto**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci  
[Maryantoyanto1974@gmail.com](mailto:Maryantoyanto1974@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the application of SAK ETAP in the presentation of financial statements and analyze the constraints faced in the application of SAK ETAP on Saleh Pisang SMEs in Desa Dalam Siulak District. This research method is descriptive qualitative using Primary data. Data collection techniques in this study were observations and interviews. The results showed that the financial statements prepared by Saleh Pisang UMKM consisted of Cash Notes, Debt Notes, Employee Salary Reports, Income Statement, and Asset Reports. This is still not in accordance with SAK ETAP standards. In SAK ETAP it is stated that the financial statements consist of Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows, and Notes to Financial Statements. In recognition, measurement, presentation of financial statements have not fully implemented SAK ETAP correctly. Because SMEs Saleh Pananas still use the method of recording cash basis whereas according to SAK ETAP must use accrual basis. The constraints of MSME Saleh Banana in implementing SAK ETAP in the preparation of its financial statements are, (1. Low understanding of owners and employees, towards SAK ETAP. 2. Lack of socialization related to Financial Statements in accordance with SAK ETAP, (2. There is no intensive assistance related to application of SAK ETAP, (3. Lack of supervision from interested parties in Saleh Pisang's MSME financial reports.*

**Keywords** : *financial statements, balance sheet, income statement, statement of changes in equity, statement of cash flows, and notes to financial statements.*

**BAB I. PENDAHULUAN**

Akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai. (Martani, 2012)

*Wikipedia*, pengertian akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis". Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha

yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu dari sektor riil yang paling banyak dijalani oleh pengusaha di Indonesia.

Menurut (Bank Indonesia, 2015) Kelayakan usaha, aspek keuangan, aspek pemasaran dan aspek sumber daya manusia (tenaga kerja) merupakan permasalahan UMKM yang dirasakan selama ini oleh pihak Bank. Belum adanya kesamaan *mindset* antara persyaratan bank yang harus dipenuhi oleh UMKM, termasuk ketersediaan laporan keuangan dan *bussines plan* (rencana pengembangan usaha) merupakan kendala yang menyebabkan minimnya akses keuangan UMKM. Padahal dengan adanya laporan sangat bermanfaat dalam membantu UMKM untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan Usaha Kecil. Beberapa hasil penelitian ( Pinasti, Hariyanto, Idris, Marbun ) dalam Pinasti (2007) menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi pada UMKM yang ada di Indonesia adalah pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Usaha kecil tidak atau belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan tepat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Menurut (Rudiantoro & Siregar, 2012) Potensi yang besar dari Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha.

Alasan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak menggunakan dana atau modal dari pemberi kredit yaitu rumitnya membuat laporan keuangan UMKM yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya (Kuncoro, 2013). Terkait dengan kondisi tersebut, untuk mempermudah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyusunan laporan keuangan maka pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan SAK ETAP, standar ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Dengan adanya SAK ETAP ini ke depannya tentu sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

Menurut (Fanny 2012) siklus akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian laporan mengenai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Menurut (Kieso 2011) yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah prosedur akuntansi yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan.

Akuntansi saat ini telah berkembang sangat pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Bidang-bidang akuntansi yang penting akan diuraikan seperti berikut dibawah ini :

1. Akuntansi umum dan keuangan (*General Accounting / Financial Accounting*) bidang akuntansi yang secara menyeluruh mencakup fungsi-fungsi pencatatan transaksi-transaksi serta menyusun laporan keuangan dari catatan-catatan.
2. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)  
Merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, mengawasi, menganalisis, melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi. Bidang akuntansi biaya tidak hanya menyangkut bagaimana mencatat biaya dan analisis biaya.  
Akuntansi biaya merupakan bagian penting dari penghitungan pembiayaan produksi yang akan berdampak pada kelangsungan produksi dan penentuan masa depan strategi bisnis Anda. Untuk menghasilkan sebuah pencatatan akuntansi biaya, tentunya sebuah perusahaan harus memiliki pencatatan setiap transaksi dengan baik dan benar agar terhindar dari salahnya perhitungan dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)  
Merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana.  
Menurut Muhammad Gade (2002), akuntansi pemerintahan secara umum mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai media akuntabilitas dan menyediakan informasi untuk manajemen.
4. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)  
Akuntansi Manajemen menggunakan data historis maupun data taksiran untuk membantu manajemen dalam operasional sehari-hari dan perencanaan operasional mendatang.

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**

Menurut (Martani, 2012) Akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai. Laporan keuangan merupakan informasi bagi penggunanya, terutama pemilik perusahaan investor, kreditur, dan juga manajemen untuk mengambil keputusan – keputusan terkait perusahaan di masa mendatang, seperti:

- 1) Kelayakan untuk menambah investasi kedalam perusahaan atau sebaliknya penentuan apakah harus melakukan penarikan investasi.
- 2) Kelayakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut (IAI dalam PSAK 2009) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi:

- 1) Aset
- 2) Liabilitas (Kewajiban)

- 3) Ekuitas
- 4) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- 5) Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kepastiannya sebagai pemilik
- 6) Arus kas

Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan meliputi pemilik, manajemen, kreditor, pemerintah, dan investor.

Menurut (SAK ETAP, 2009) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika: (1) Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas (2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (SAK ETAP,2009)

Menurut (Martani 2011) SAK ETAP adalah Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP sebagai solusi bagi SME (Small Medium Enterprise, ETAP).

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria yaitu: tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. Menurut (Auliyah, 2012) Contoh pengguna eksternal dalam kriteria kedua ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor dan lembaga pemeringkat kredit.

Kriteria ETAP di atas bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu jika (SAK ETAP: 2009):

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Menurut (Auliyah, 2012) umumnya entitas tanpa akuntabilitas publik adalah Usaha, Mikro Dan Menengah (UKM), oleh karena itu pengguna Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UKM. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) ini adalah sebagai alternatif Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk SAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum yang lebih rumit.

## **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) menyebutkan bahwa definisi UMKM adalah sebagai berikut :

### **1. Usaha Mikro**

Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

### **2. Usaha Kecil**

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### **3. Usaha Menengah**

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang (Rahmana, 2015).

Menurut Kementerian Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

## **Kriteria UMKM**

Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) menyebutkan bahwa kriteria usaha kecil

- 1) Jenis barang dan komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, dan keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha
- 4) Sudah memiliki ijin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- 5) Sumber daya manusai (pengusaha) memiliki pengalman dalam berwirausaha
- 6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal
- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business plan*.

Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) menyebutkan bahwa kriteria menengah.

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang sudah jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan juga bagian produksi.
- 2) Melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek dan pemeliharaan kesehatan dll.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain : ijin dari tetangga, ijin usaha, ijin tempat, NPWP dan upaya pengelolaan lingkungan dll.
- 5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia terlatih.

## **Asas dan Tujuan UMKM**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah bahwa UMKM berasaskan :

1. Kekeluargaan
2. Demokrasi Ekonomi
3. Kebersamaan
4. Efisiensi Keadilan
5. Berkelanjutan
6. Berwasan Lingkungan
7. Kemandirian
8. Keseimbangan Kemajuan

## **BAB. II METODE PENELITIAN**

Adapun ruang lingkup dari penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang di Desa dalam Kecamatan Siulak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber intern UMKM, baik melalui obervasi maupun wawancara langsung pada pihak yang berwenang di UMKM Saleh Pisang Desa Dalam Kecamatan Siulak.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif. Menurut Moleong (2012), analisis deskriptif adalah mendeskripsikan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, kemudian menganalisis dengan teori yang ada. Adapun prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan catatan penelitian yang dengan tema yang dibutuhkan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan yang diperoleh dilapangan dan data sekunder lainnya yang dibutuhkan.
2. Mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data yang memperlihatkan kondisi yang ada penerapan SAK ETAP pada UMKM Saleh Pisang Desa Dalam Kecamatan Siulak yang meliputi:
  - 1) Neraca
  - 2) Laporan Laba Rugi
  - 3) Laporan Perubahan Ekuitas
  - 4) Laporan Arus Kas
  - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan
3. Menganalisis laporan keuangan yang ada pada UMKM Saleh Pisang Di Desa Dalam Kecamatan Siulak dan juga penerapan sesuai SAK ETAP.
4. Memberi rekomendasi tentang peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang Di Desa Dalam Kecamatan Siulak.

## **BAB. III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) Saleh Pisang Desa Dalam Kecamatan Siulak, penulis mendapatkan data berupa catatan laporan keuangan UMKM per 31 desember 2017, yaitu catatan kas, catatan hutang, catatan laporan gaji karyawan, laporan laba rugi, dan laporan aset. Dari data tersebut penulis ingin melihat apakah catatan laporan keuangan UMKM Saleh Pisang ini sudah sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau belum.

### **Siklus Akuntansi**

*“Tahap penjurnalan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang selama ini belum melakukan pencatatan atas transaksi dengan pembuatan jurnal dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Pencatatan transaksi dan kegiatan akuntansi UMKM Saleh Pisang menggunakan cash basis membuat laporan keuangan semakin akan mengalami kesalahan nilai nominal dari beberapa akun – akun yang ada. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sendiri dijelaskan bahwa metode pengakuan yang dipakai harus menggunakan accrual basis”.*

### **Pengakuan Akun-Akun Pada Laporan Posisi Keuangan di UMKM Saleh Pisang Sesuai SAK ETAP**

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Pengakuan Posisi Laporan Keuangan**  
**UMKM Saleh Pisang Dengan Ketentuan SAK ETAP**

<b>SAK ETAP</b>	<b>UMKM Saleh Pisang</b>	<b>Kriteria</b>
Paragraf 7.16 entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.	Pengakuan kas dan setara kas di catat didalam buku catatan kas berdasarkan besarnya kas yang di dapat maupun kas yang dikeluarkan	Sesuai
11.3 Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual	Mengakui nilai persediaan berdasarkan uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan	Sesuai
Aset Tetap pada SAK ETAP paragraf 15.4 diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan	Pencatatan Aset nya masih dicatat pada buku laporan aset, namun mencatat nya berdasarkan uang yang dikeluarkan untuk membeli aset	Sesuai
Paragraf 2.35 Pengakuan kewajiban menurut SAK ETAP diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal	Kewajiban yang dilakukan berkaitan dengan kebutuhan perusahaan, dan kewajiban dihitung berdasarkan kas yang diterima maupun kas yang dikeluarkan untuk kewajiban	Sesuai
Menurut SAK ETAP paragraf 19.23 Modal	Tidak mencatat modal karena nilai	Tidak Sesuai



dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor, nilai nominalnya dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca.	nominal besarnya modal, pemilik sudah lupa	
---	--	--

Sumber : *Data Diolah*

## **Pengukuran Akun-Akun Pada Laporan Posisi Keuangan UMKM Saleh Pisang Sesuai SAK ETAP**

**Tabel 2**  
**Perbandingan Pengukuran Posisi Laporan Keuangan**  
**UMKM Saleh Pisang Dengan Ketentuan SAK ETAP**

<b>SAK ETAP</b>	<b>UMKM Saleh Pisang</b>	<b>Kriteria</b>
Paragraf 2.31 dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar	Pencatatan kas dan setara kas berdasarkan harga perolehan dengan lebih rinci berdasarkan jumlah seluruh nominal	Sesuai
paragraf 11.3 menyatakan entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual	Pengukuran persediaan diukur berdasarkan harga perolehan	Sesuai
Paragraf 2.31 Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban	Pada akun hutang mencatat nilai nominal diukur berdasarkan jumlah kas yang masuk	Sesuai
Paragraf 15.6 dijelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur berdasarkan harga perolehan.	Mencatat besarnya nilai suatu aset tersebut adalah dengan mencatat sesuai dengan harga perolehan	Sesuai
2.19 Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas.	Pengukuran besarnya modal belum diketahui karena perusahaan tidak mencatat modal pada laporan keuangannya.	Tidak Sesuai

Sumber : *Data Diolah*

## **Penyajian Akun-Akun Pada Laporan Posisi Keuangan UMKM Saleh Pisang Sesuai SAK ETAP**

Pengakuan dari data laporan keuangan UMKM Saleh Pisang antara lain catatan kas, catatan hutang, dan laporan aset harus di akui dalam neraca. Pada kasus ini UMKM Saleh Pisang belum membuat neraca pada laporan keuangannya.

### **Pengakuan Akun-Akun Pada Laporan Laba Rugi di UMKM Saleh Pisang Sesuai SAK ETAP**

**Tabel 4.**  
**Perbandingan Pengakuan Laporan Laba Rugi**  
**UMKM Saleh Pisang Dengan Ketentuan SAK ETAP**

<b>SAK ETAP</b>	<b>UMKM Saleh Pisang</b>	<b>Kriteria</b>
20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume	Pengakuan pendapatan dukur berdasarkan kas yang diterima dari aktivitas penjualan	Sesuai
2.37 Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal	Beban dicatat pada laporan laba rugi untuk mengurangi pendapatan yang mengakibatkan berkurangnya nilai pendapatan	Sesuai

Sumber : *Data Diolah*

### **Pengukuran Akun-Akun Pada Laporan Laba Rugi di UMKM Saleh Pisang Sesuai SAK ETAP**

**Tabel 5.**  
**Perbandingan Pengukuran Laporan Laba Rugi**  
**UMKM Saleh Pisang Dengan Ketentuan SAK ETAP**

<b>SAK ETAP</b>	<b>UMKM Saleh Pisang</b>	<b>Kriteria</b>
Paragraf 20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.	Menghitung jumlah kas masuk yang didapat dari penjualan	Sesuai
Penyajian wajar menurut SAK ETAP yaitu penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, dan beban. Beban diakui pada laporan laba rugi dan diukur berdasarkan nilai wajar.	Menghitung berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan untuk beban	Sesuai

Sumber : *Data Diolah*

### **Penyajian Akun-Akun Pada Laporan Laba Rugi di UMKM Saleh Pisang Sesuai SAK ETAP**

Paragraf 5.1 mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

Paragraf 5.4 menyatakan entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Perubahan ekuitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang hanya berasal dari laba rugi saja sehingga dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo kas sebagai pengganti laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Sebagaimana dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) paragraf 3.13, Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang sudah membuat laporan laba rugi pada laporan keuangannya, namun masih belum sesuai dengan SAK ETAP. Karena belum membuat penyusutan, dan belum mencatat HPP pada laporan laba ruginya.

### **Laporan Arus Kas**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) paragraf 7.1 mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atau kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Paragraf 7.17 entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hukum.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menganjurkan laporan arus kas dibuat dengan metode tidak langsung. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang belum membuat laporan arus kas dalam laporan keuangannya. Dalam kegiatan usahanya, UMKM Saleh Pisang tidak memiliki aktivitas investasi maupun pendanaan. Hal ini disebabkan karena lingkup usaha yang masih kecil, sehingga UMKM Saleh Pisang memaksimalkan aset yang telah dimiliki.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Tujuan dari laporan perubahan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) paragraf 6.2 yaitu Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Paragraf 6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- 1) Laba atau rugi untuk periode
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- 3) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang belum membuat laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangannya.

### **Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) UMKM Saleh Pisang Sesuai SAK ETAP**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang dalam penyusunan laporan keuangannya masih belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dikarenakan laporan keuangan yang di buat sebelumnya juga masih belum lengkap, hal itu juga di dasari dengan keterbatasan pengetahuan dari pemilik maupun karyawan UMKM Saleh Pisang tentang CALK. Berdasarkan wawancara dengan Pak Rahman pada hari Jumat 09 februari 2018 pukul 14.40 WIB menyatakan:

laporan keuangan yang dibuat kemaren saja ternyata banyak yang salah , apa lagi catatan atas laporan keuangan? Tambah tidak tau pemilik apa itu catatan atas laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) paragraf 8.1 mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos – pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Paragraf 8.2 Catatan atas laporan keuangan harus:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusutan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang di gunakan.
- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam Laporan Keuangan.
- 3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan, tetapi relevan untuk memahami Laporan Keuangan.

Paragraf 8.4 menyatakan secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK ETAP
- 2) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
- 3) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- 4) Pengungkapan lain.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang belum membuat Catatan Atas Laporan keuangan sehingga penulis merekomendasikan Catatan Atas Laporan Keuangan

### **Kendala Yang Dihadapi UMKM Saleh Pisang Dalam Menerapkan SAK ETAP**

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan sulitnya penerapan SAK ETAP tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis terdapat beberapa hal yang menghambat penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan UMKM Saleh Pisang.

1. Rendahnya pemahaman pemilik maupun karyawan terhadap SAK ETAP.
2. Kurangnya sosialisasi terkait Laporan Keuangan yang sesuai SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus pedoman standar ini.
3. Belum adanya pendampingan yang intensif terkait penerapan SAK ETAP oleh badan UMKM terkait.
4. Tidak adanya pengawasan dari pihak – pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM Saleh Pisang.

#### **BAB IV. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam laporan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disusun oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang terdiri atas Catatan Kas, Catatan Hutang, Laporan Gaji Karyawan, Laporan Laba Rugi, dan Laporan aset. Hal ini masih belum sesuai dengan standar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Di dalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Dalam pengakuan, pengukuran, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan benar. Karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang masih menggunakan metode pencatatan *cash basis* sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) harus menggunakan *accrual basis*.
3. Kendala dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Rendahnya pemahaman pemilik maupun karyawan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
  - 2) Kurangnya sosialisasi terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus pedoman standar ini
  - 3) Belum adanya pendampingan yang intensif terkait penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh badan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terkait

- 4) Tidak adanya pengawasan dari pihak – pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang

## **Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran dalam upaya pembenahan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Saleh Pisang:

1. Dalam pembahasan sudah disediakan rekomendasi laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sehingga rekomendasi bisa diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan selanjutnya.
2. Merubah dasar pencatatan dari *cash basis* menjadi *accrual basis* seperti yang sudah ditetapkan SAK ETAP untuk laporan keuangan UMKM Saleh Pisang.
3. Entitas terkait sebaiknya memberikan pemahaman tentang SAK ETAP kepada UMKM sehingga laporan keuangan yang mereka buat akan sesuai dengan standar
4. Adanya sosialisasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
5. Adanya pendampingan dari pihak berwenang yang intensif dan memberi bimbingan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andang, S. 2013. *Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
- Andriani, L., A. T. Atmadja, dan N. K. Sinarwati. 2014. Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (MKM) (Sebuah Studi Interpretif Pada Peggy Salon). *E-Journal*. Vol. 2.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama, Cetakan ke-2*. Jakarta : Kencana.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Fanny. 2012. Contoh Membuat Akuntansi Excel  
[http://syannegracetine.blogspot.co.id/2013/11/materi-sak-etap\\_14.html](http://syannegracetine.blogspot.co.id/2013/11/materi-sak-etap_14.html)
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Kasmir, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Tujuh Tantangan UKM di Tengah Krisis Global. *Harian Bisnis Indonesia*. <http://www.mudrajad.com>.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Tujuh Tantangan UKM di Tengah Krisis Global. *Harian Bisnis Indonesia*. <http://www.mudrajad.com>. Diunduh pada tanggal 7 Juni 2016.
- Meleong, Lexy J. 2012. “Metode Penelitian Kualitatif”. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Putra, Herman Adhy dan Elisabeth Penti Kurniawan. 2012. *Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)*. Pekan Ilmiah Dosen FEB-Universitas Kristen Satya Wacana. 14 Desember 2012.
- Rudiantoro, R., dan S. V. Siregar. 2012. *Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP*. Depok: Universitas Indonesia.
- Sisca Ayu Putri Darsono. (2011). “Studi tentang penerapan pencatatan keuangan pada usaha mikro, kecil dan menengah ( studi kasus pada Depot trifena di kota Mojokerto”. Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur
- Tanugraha, Jevon. 2012. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada PT TDMN, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.<http://fe-akuntansi.unila.ac.id/>. Diakses 10 November 2015.
- Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2008 *tentang UMKM Bab IV Pasal 16*. Jakarta
- Vina Mukti Azaria.(2013). Penerapan akuntansi pada UKM unggulandi Kabupaten Kota Blitar dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP”. Universitas Jember
- Wahdani dan Suhairi. 2006. *Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Menengah*, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang (23-26 Agustus):1-12.
- Yuliana, R. 2014. *Analisis Penyusunan Laporan Laba Rugi dan Neraca Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UD. Andy Putera*. Jember: Universitas Jember.
- [http://www.spengetahuan.com/2017/10/pengertian-akuntansi-pemerintahan\\_tujuan-karakteristik-syarat-ruang-lingkup.html](http://www.spengetahuan.com/2017/10/pengertian-akuntansi-pemerintahan_tujuan-karakteristik-syarat-ruang-lingkup.html)
- <https://sitinurani2012.wordpress.com/2013/05/09/2/>